

EVALUASI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI SEKOLAH

Oleh:

Nur Istiqomah,

Fityan Izza Noor Abidin

Progam Studi Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Januari 2024

Pendahuluan

Pendidikan berperan penting untuk membentuk karakter masyarakat dan menambah ilmu pengetahuan sehingga dapat membangun negara yang maju. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan peluang memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu adalah dengan menyelenggarakan program penyediaan dana bagi pelajar programnya disebut Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu program pemerintah yang berfungsi guna pendanaan biaya operasi non personalia untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang sebagai pelaksanaan program wajib belajar.

tujuan dari diberikannya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler adalah untuk mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau bagi semua kalangan masyarakat

Rumusan Masalah

Bagaimana evaluasi akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ?

Bagaimana pengelolaan akuntabilitas agar dapat mewujudkan *good governance* ?

Metode



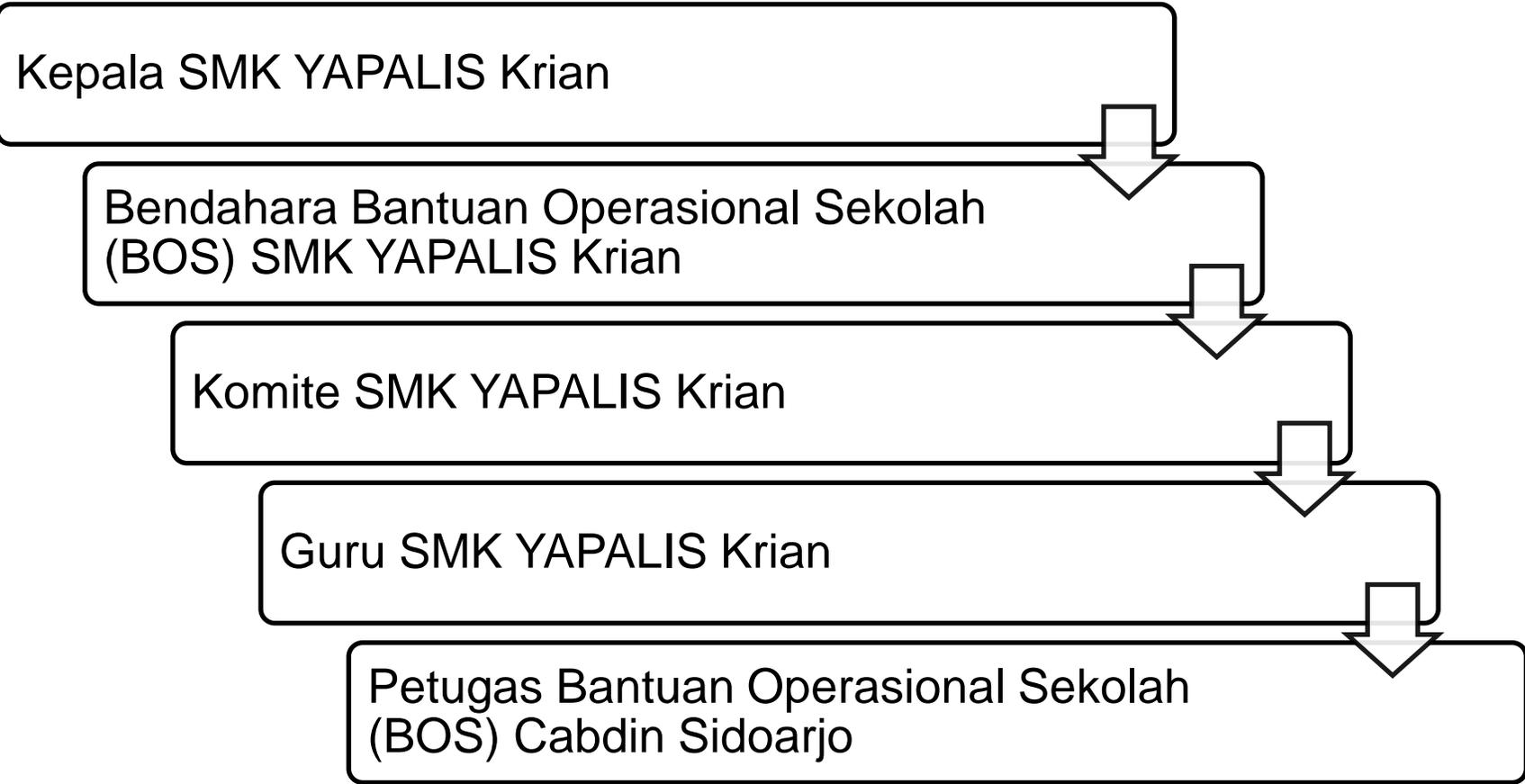
Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian ini adalah di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YAPALIS Krian yang berada dibawah naungan Yayasan Perguruan Al-Islam Krian. Alasan pemilihan tempat penelitian dikarenakan peneliti bekerja di SMK YAPALIS Krian yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh data lebih akurat dibandingkan dengan di SMK lainnya. Selain itu SMK YAPALIS Krian dari mulai tahun berdiri yaitu tahun 2008 hingga pada tahun 2022 mengalami perkembangan peserta didik yang signifikan

Informan



Teknik Pengumpulan Data

Interview atau Wawancara

- Wawancara dilakukan dengan terstruktur dan terbuka

Observasi

- Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mengetahui keadaan umum SMK YAPALIS Krian. Khususnya observasi ini dilakukan untuk mengamati Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK YAPALIS Krian

Dokumentasi

- Dokumentasi dalam penelitian ini berupa laporan keuangan dana BOS selama tahun 2022 berlangsung, yaitu :
 1. ARKAS
 2. Lembar Kertas Kerja Tahap
 3. Buku Kas Umum (BKU)
 4. Buku Pembantu Kas Tunai (BKU - Tunai)
 5. Buku Pembantu Bank (BKU - Bank)
 6. Buku Pembantu Pajak (BKU - Pajak)
 7. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS (K7a)
 8. Buku Pembantu Rincian Objek Belanja
 9. Rekapitulasi Realisasi Belanja Dana BOS - Barang Modal/Aset (BHM)
 10. Rekapitulasi Realisasi Belanja Dana BOS - Barang Habis Pakai (BHP)
 11. Laporan BOS Online Kemdikbud

Teknik Analisis Data

Data Collection (Pengumpulan Data)

- Yaitu pengumpulan data awal atau data mentah yang belum diolah dari hasil wawancara oleh Kepala Sekolah, Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Komite Sekolah, Guru dan hasil observasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Dokumentasi Pelaporan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh peneliti

Data Reduction (Reduksi Data)

- Setelah semua data terkumpul penyederhanaan dilakukan dengan cara memilih, memfokuskan dan mentransformasikan keabsahan data asli menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan

Data Display (Penyajian Data)

- Bentuk penyajian data yang sering digunakan dalam data kualitatif adalah naratif, menyajikan data dalam bentuk kumpulan informasi yang sistematis dan mudah dipahami

Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan)

- Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data. data yang terkumpul dibandingkan dengan Permedikbud Nomor 6 Tahun 2021, dan selanjutnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



Evaluasi Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Harus Ada Komitmen Dari Pimpinan Dan Seluruh Staf Instansi Untuk Melakukan Pengelolaan Pelaksanaan Misi Agar Akuntabel

- Berdasarkan hasil wawancara tersebut mengenai harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK YAPALIS Krian menunjukkan bahwa telah terjalin komitmen antara pimpinan dengan tim manajemen pengelolaan dana BOS hal ini dibuktikan dengan adanya SK Tim Manajemen BOS yang terdiri dari pimpinan, guru, komite dan orang tua/wali murid yang menjadi tim manajemen BOS. Setiap empat bulan sekali/tiap enam bulan sekali sekolah akan membuat laporan pertanggungjawaban BOS. Sedangkan setiap enam bulan sekali/setiap tahun sekolah akan membuat komitmen dengan pemerintah pusat berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai yang ditanda tangani oleh Kepala sekolah.

Harus Merupakan Suatu Sistem Yang Dapat Menjamin Penggunaan Sumber Daya Secara Konsisten Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

- Hasil dari wawancara diatas mengenai prinsip akuntabilitas yang kedua yaitu harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK YAPALIS Krian menunjukkan bahwa Juknis (petunjuk teknis)/peraturan/pedoman sangat penting bagi sekolah dalam melaksanakan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pelaporan. Sehingga, setiap sekolah wajib memiliki Juknis (petunjuk teknis)/peraturan/pedoman dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk dapat mewujudkan salah satu prinsip akuntabilitas tersebut. SMK YAPALIS Krian sudah mematuhi segala peraturan yang ditetapkan dalam Juknis (petunjuk teknis)/peraturan/pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selaku pemberi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Harus Dapat Menunjukkan Tingkat Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Yang Telah Ditetapkan

- Berdasarkan hasil wawancara mengenai prinsip akuntabilitas yang ketiga yaitu harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK YAPALIS Krian menunjukkan bahwa pada dasarnya Pemerintah memberikan bantuan dana BOS adalah untuk membantu sekolah agar dapat memberikan pembelajaran yang lebih optimal. Dana BOS dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah. Sehingga SMK YAPALIS Krian menggunakan dana BOS tersebut sesuai dengan kebutuhan sekolah yang menjadi dasar dari tercapainya tujuan diberikannya dana BOS. Dan untuk daya serapannya SMK YAPALIS Krian telah terserap 100%, meski tidak merata diantara 12 poin kegiatan tersebut.

Harus Berorientasi Pada Pencapaian Visi Dan Misi Serta Hasil Dan Manfaat Yang Diperoleh

- Hasil dari wawancara diatas mengenai prinsip akuntabilitas keempat yaitu harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK YAPALIS Krian menunjukkan bahwa sekolah telah mendapatkan banyak sekali manfaat dari setiap kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara efisien digunakan untuk membiayai seluruh pos pengeluaran yang telah dianggarkan.

Harus Jujur, Objektif, Transparan Dan Inovatif Sebagai Katalisator Perubahan Manajemen Instansi Pemerintah Dalam Bentuk Pemutakhiran Metode Dan Teknik Pengukuran Kinerja Dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas

- Berdasarkan hasil wawancara mengenai prinsip akuntabilitas yang kelima yaitu harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK YAPALIS Krian menunjukkan bahwa telah jujur dalam pengelolaan dana BOS hal ini dibuktikan dengan pencatatan dan pelaporan sudah sesuai dengan RKAS dan juga sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena pelaporan dana BOS mulai tahun anggaran 2022 ini menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh pemerintah yang disebut dengan ARKAS. Dan para tim manajemen BOS sekolah selalu melakukan pembelanjaan yang sesuai dengan perencanaan yang dianggarkan

Pengelolaan Akuntabilitas Agar Dapat Mewujudkan Good Governance

Harus Ada Komitmen Dari Pimpinan Dan Seluruh Staf Instansi Untuk Melakukan Pengelolaan Pelaksanaan Misi Agar Akuntabel Sebagai Upaya Mewujudkan *Good Governance*

- Dengan adanya laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pihak sekolah dapat membuktikan bahwa sekolah SMK YAPALIS Krian sudah menerapkan adanya transparansi dan keterbukaan. Pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis dan tersedia bagi pihak yang membutuhkan, Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi, misi organisasi, serta standar yang berlaku. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut. Selain itu, SMK YAPALIS Krian juga sudah memenuhi prinsip *Good Governance* yang ketiga yaitu Aturan Hukum (*Rule of Law*). Setiap enam bulan sekali/setiap tahun sekolah akan membuat komitmen dengan pemerintah pusat berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai yang ditanda tangani oleh Kepala sekolah. Hal ini dapat digunakan sebagai bukti secara tertulis bahwa SMK YAPALIS Krian sudah mematuhi aturan penggunaan dana BOS sesuai aturan yang berlaku.

Harus Merupakan Suatu Sistem Yang Dapat Menjamin Penggunaan Sumber Daya Secara Konsisten Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Sebagai Upaya Mewujudkan *Good Governance*

- Dengan adanya juknis dapat dikatakan bahwa SMK YAPALIS Krian sudah memenuhi prinsip *Good Governance* yaitu transparan, keterbukaan dan aturan hukum. Dengan adanya juknis tersebut penggunaan dana BOS dapat diawasi karena pelaporan yang dibuat. Dan meminimalisir adanya kecurangan dalam penggunaan dana BOS karena sudah ada juknis resmi yang dikeluarkan.

Harus Dapat Menunjukkan Tingkat Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Yang Telah Ditetapkan Sebagai Upaya Mewujudkan *Good Governance*

- Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut ditunjukkan dengan adanya pelaporan setiap kegiatan yang dilakukan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa SMK YAPALIS Krian melakukan transparan dan keterbukaan data. Hal ini juga di atur undang-undang nomor 51 tahun 2020 bab 3 point 4

Harus Berorientasi Pada Pencapaian Visi Dan Misi Serta Hasil Dan Manfaat Yang Diperoleh Sebagai Upaya Mewujudkan *Good Governance*

- Untuk mewujudkan *good governance* di SMK YAPALIS Krian , sekolah berupaya menerapkan konsep *good governance* diantaranya menerapkan konsep transparan dan keterbukaan dalam seluruh pelaporan yang di buat. Selain itu, SMK YAPALIS Krian juga Mempublikasikan setiap perencanaan, penggunaan dan pelaporan anggaran BOS kepada stakeholders internal maupun eksternal. Publikasi tersebut biasanya dilakukan lewat media grup whatsapp sekolah untuk stakeholders internal dan melalui laporan ringkas berupa hardfile dan juga softfile yang dikirimkan ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kab. Sidoarjo serta laporan online melalui website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu <https://bos.kemdikbud.go.id/> sebagai bentuk pemberitahuan untuk stakeholders eksternal. Publikasi internal diperuntukkan kepada seluruh pihak yang ada disekolah seperti guru, karyawan dan komite sekolah. Untuk di bagian eksternal kita publikasikan kepada Yayasan, orang tua/wali murid, Cabang Dinas dan juga Kementerian.

Harus Jujur, Objektif, Transparan Dan Inovatif Sebagai Katalisator Perubahan Manajemen Instansi Pemerintah Dalam Bentuk Pemutakhiran Metode Dan Teknik Pengukuran Kinerja Dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Sebagai Upaya Mewujudkan *Good Governance*

- Hal ini menunjukkan bahwa SMK YAPALIS Krian mewujudkan konsep *good governance* dalam pengelolaan dana BOS. Dengan adanya kwintasi dan bukti-bukti fisik yang ada menunjukkan bahwa SMK YAPALIS Krian sudah transparan dan keterbukaan. Selain itu juga karena SMK YAPALIS Krian sudah menggunakan aplikasi ARKAS. Sehingga akan meminimalisir adanya kecurangan yang terjadi. Hal itu berarti juga menerapkan konsep aturan hukum. Karena sudah mematuhi aturan yang telah di berikan oleh tim manajemen bos. Hal tersebut juga sesuai dengan undang-undang nomor 02 tahun 2022 pasal pasal 35 ayat 1

Pembahasan

Evaluasi Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

- Berdasarkan hasil lapangan dalam aspek pencatatan bahwa SMK YAPALIS Krian setiap pengeluaran dan pemasukan dana BOS telah di catat dalam buku kas umum disertai bukti transaksi seperti kwitansi sebagai bukti pengeluaran dana yang akan dicocokkan pada saat pencatatan, serta tersedia dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOS. Pencatatan yang dilakukan oleh SMK YAPALIS Krian sudah sesuai dengan arahan dan petunjuk tim BOS provinsi. dalam aspek pelaporan bahwa SMK YAPALIS Krian dalam membuat laporan sesuai dengan petunjuk tim BOS, waktu pelaporan realisasi anggaran dana BOS dilakukan tiap satu triwulan dan juga laporan rekapan tahunan kemudian laporan itu nantinya akan diberikan kepada cabang dinas. Dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada SMK Nurul Hasan sudah sesuai dengan petunjuk teknis BOS dan teori diatas

Pengelolaan Akuntabilitas Agar Dapat Mewujudkan *Good Governance*

- Hasil temuan yang didapatkan oleh peneliti setelah kegiatan penelitian dan analisa yaitu Penerapan prinsip *good governance* dalam penggunaan Dana BOS di SMK YAPALIS Krian telah menggunakan petunjuk teknis (JUKNIS). SMK YAPALIS Krian menggunakan penyusunan anggaran Dana BOS dengan sistem ARKAS. ARKAS adalah sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian.
- Keterbukaan dalam perencanaan keuangan dilakukan di SMK YAPALIS Krian, yaitu dengan membuat RKAS (Rencana Kegiatan anggaran sekolah) pada tahun ajaran baru. Proses pembuatan RKAS menggunakan sistem *bootom up*, yaitu usulan anggaran kegiatan dari bawah (guru dan karyawan serta komite) dan disetujui oleh atasan yaitu kepala sekolah. Dalam perencanaan anggaran sekolah pihak yang terlibat adalah kepala sekolah, guru, staff, dan komite yang membuat rencana anggaran sesuai dengan JUKNIS.

PENUTUP



Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK YAPALIS Krian sudah berjalan cukup baik karena sudah sesuai dengan indikator *good governance*, yaitu transparansi, keterbukaan dan aturan hukum. Adanya keterlibatan semua oknum yang berkepentingan mulai dari Dinas pendidikan, tim manajemen sekolah, guru, karyawan dan komite sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran, hal ini menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan proses pembahasan anggaran secara terbuka sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan Dana BOS pada masing-masing sekolah tersebut. Selain itu, dengan membuat laporan kegiatan penggunaan dana BOS dan memublishnya ke pihak yang berkepentingan dapat menunjukkan bahwa SMK YAPALIS Krian sudah transparan dan terbuka.

Saran

Bagi SMK YAPALIS Krian sebaiknya publikasi penggunaan dana BOS dilakukan di tempat umum seperti papan informasi agar transparansi lebih terbuka terhadap masyarakat sekolah dan halayak umum.

Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk bisa menambahkan variabel lain seperti efektivitas yang tidak termasuk dalam penelitian ini serta penentuan indikator yang lebih tepat sehingga nantinya diharapkan dana BOS dalam pengelolaan dan pemanfaatannya mampu memberikan pengaruh yang lebih besar dan kuat terhadap hasil belajar siswa

Bagi semua stakeholder yang terkait dengan program kerja yang menggunakan anggaran Dana BOS supaya lebih aktif dan berpartisipasi dalam pengusulan pembuatan RKAS, dan penggunaan anggaran Dana BOS itu harus sesuai antara perencanaan anggaran dengan realisasi penggunaan anggaran untuk menghindari tindakan pidana dikemudian hari.

